

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia, hal ini berarti manusia berhak mendapat pendidikan dalam hidupnya. Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam upaya meningkatkan kualitas bangsa, terutama kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berpendidikan merupakan pilar utama bangsa untuk bersaing di era global seperti saat ini. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, oleh karena itu pemerintah wajib memenuhi hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas manusia suatu bangsa. Kewajiban pemerintah ini tercantum dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 Pasal 11 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Keberhasilan pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tidak lepas dari pengaruh manajemen penyelenggaraan proses pendidikan. Manajemen penyelenggaraan pendidikan salah satunya dapat dilaksanakan dengan menggunakan ilmu Administrasi Pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan ilmu yang membahas pendidikan dari sudut pandang kerjasama dalam proses mencapai tujuan pendidikan. Suhardan dan Suharto (2018, hlm. 13) mengemukakan bahwa “administrasi pendidikan secara sistematis dijalankan melalui tiga fungsi kegiatan, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan”.

Fungsi kegiatan yang utama dilakukan oleh administrator, yaitu perencanaan. Di mana administrator akan merencanakan atau menyusun rencana

mengenai apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik jangka pendek, menengah atau jangka panjang, tapi tidak mengabaikan rencana yang sudah dijalankan sebelumnya. Ini sejalan dengan pendapat Sa'ud dan Makmum: "Perencanaan pendidikan adalah suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan cara yang optimal dalam pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara" (Sa'ud dan Makmum, 2005, hlm. 27).

Kebutuhan terhadap perencanaan pendidikan diakibatkan oleh adanya kompleksitas masyarakat pada saat ini, seperti jumlah penduduk, kebutuhan akan tenaga kerja, masalah lingkungan dan adanya keterbatasan sumber daya alam. Perencanaan berfungsi sebagai pemberi arah bagi terlaksananya aktivitas yang disusun secara komprehensif, sistematis dan transparan.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang paling mungkin untuk dilaksanakan. Melalui perencanaan dapat dijelaskan tujuan yang akan dicapai, ruang lingkup pekerjaan yang akan dijalankan, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut, berbagai sumber daya yang diperlukan, serta langkah-langkah dan metode kerja yang dipilih berdasarkan urgensi dan prioritasnya.

Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, maka ruang lingkup perencanaan pendidikan, meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dalam pemenuhan kedelapan standar ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Upaya pemerintah dalam pemenuhan standar nasional pendidikan ini dikuatkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Menurut Kemdikbud (2011) "Setelah semua sekolah telah dapat memenuhi SPM, maka standar minimal ini akan ditingkatkan secara berkala sampai semua sekolah telah memenuhi SNP". Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 1 ayat (1), SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu standar yang mendukung terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah standar sarana dan prasarana pendidikan. “Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kontribusi sarana dan prasarana dalam pendidikan, tentu diperlukan pengetahuan yang komprehensif mengenai seluk beluk pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan” (Mulyati dan Suryadi, 2018, hlm. 212).

Namun pengertian sarana dan prasarana lebih jelas tertuang dalam Peraturan Menteri pendidikan No. 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana, “sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Prasarana pendidikan adalah segala macam alat, perlengkapan, atau benda-benda yang dapat digunakan untuk memudahkan (membuat nyaman) penyelenggaraan pendidikan termasuk ruang kelas”.

Pemenuhan prasarana merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Matin (2013, hlm. 11) menyatakan bahwa

Perencanaan pendidikan pada ini berkaitan dengan suatu hal yang bersifat kuantitatif, seperti jumlah sekolah, jumlah ruang kelas, guru dan siswa, biaya yang diperlukan oleh sekolah menurut jenis dan jenjangnya, bagaimana menyediakan sumber daya manusia yang terbaik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi dan keterampilan khusus apa yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya.

Berdasarkan pernyataan Matin di atas, analisis mengenai kebutuhan ruang kelas menjadi salah satu yang perlu dilakukan dalam perencanaan pendidikan. “Perencanaan pendidikan memiliki empat pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan sosial (*social demand approach*); pendekatan ketenagakerjaan (*manpower approach*); pendekatan untung rugi (*cost and benefit approach*); dan pendekatan keefektifan biaya (*cost effectiveness approach*)” (Saud, 2013, hlm. 15).

Kumar (2004, hlm. 143) mengemukakan “dasar dari perencanaan pendidikan dasar adalah dengan pendekatan *social demand* yang dasarnya adalah pertumbuhan penduduk usia sekolah (PUS), artinya perencanaan ini didasarkan pada tren kependudukan”. Metode dengan teknik proyeksi digunakan untuk menghitung jumlah penduduk usia sekolah.

Perencanaan kebutuhan ruang kelas adalah proses menentukan jumlah ruang kelas yang dibutuhkan agar kesenjangan antara jumlah kelas yang ada dengan jumlah rombongan belajar pada setiap tahunnya dapat seimbang. Jika ketersediaan ruang kelas tidak memenuhi kapasitas rombongan belajar ditakutkan akan menghambat proses kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu, dilakukanlah proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah untuk menentukan kebutuhan ruang kelas baru. Matin (2013, hlm. 4) mengemukakan bahwa

Proyeksi adalah suatu aktivitas memperkirakan suatu kondisi di masa depan berdasarkan data dan informasi di masa lampau dan di masa depan. Berbeda dengan perkiraan yang disebut peramalan (*forecasting*) yang biasanya tidak menggunakan atau tidak membutuhkan data perkembangan di masa lampau tetapi lebih mengutamakan aspek spiritual, intuisi, dan *trial and error*.

Permasalahan yang kerap terjadi mengenai prasarana sekolah ini, diantaranya sekolah mengalami kekurangan kelas dikarenakan jumlah rombongan belajar yang melebihi kapasitas ruang kelas, ruang kelas yang ada mengalami kerusakan, baik kerusakan ringan; sedang; maupun berat, bangunan sekolah yang sudah lama, terkena bencana alam, dan sebagainya. Selain itu, perubahan jumlah penduduk usia sekolah juga akan merubah jumlah peserta didik baru yang akan terserap di sekolah dasar, yang akan berdampak pula pada jumlah kebutuhan ruang kelas yang harus direnovasi dan dibangun.

Diketahui sekolah dasar negeri yang berada di Kabupaten Subang kurang lebih sebanyak 848 sekolah, jika minimal di setiap sekolah memiliki 6 ruang kelas maka jumlah ruang kelas yang ada di sekolah di kabupaten Subang sebanyak 5.088 ruang kelas. Untuk data lebih lengkap dan akurat referensinya berasal dari dinas pendidikan kabupaten Subang. Dari artikel yang ditulis oleh Zaenudin (2020, 14 Januari) menuliskan bahwa

Bangunan SDN Cintawinaya di Desa Peringkasap, Kecamatan Pabuaran rusak parah. Puluhan siswa terpaksa harus belajar dengan ship atau bergantian. Dari enam lokal ruang kelas belajar dua diantaranya mengalami rusak. Dua ruang kelas itu adalah kelas 2 dan 3. Pada tahun 2019, menuliskan bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Subang memprihatinkan, karena masih banyak Ruang Kelas Baru (RKB) yang rusak bahkan kekurangan. Kusdinar (Kadisdik Kabupaten Subang sebelumnya) memaparkan, tidak bisa dipungkiri bangunan sekolah di Kabupaten Subang kurang lebih ada 6.500 ruangan kelas. Itu total dari SD

dan SMP. Dari data tersebut, dibutuhkan perbaikan 350 untuk RKB SD dan 115 untuk RKB SMP.

Proyeksi kebutuhan ruang kelas ini digunakan untuk memperkirakan jumlah ruang kelas di masa yang akan datang seimbang dengan jumlah peserta didik. Ruang kelas merupakan salah satu faktor penunjang yang penting dalam pembelajaran, jika ruang kelas tidak memadai ditakutkan pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan sempurna. Ketika peserta didik melaksanakan pembelajaran di luar ruang kelas (di taman) maka fokus peserta didik terhadap pembelajaran akan terbagi, karena terpengaruh oleh lingkungan sekitar tempat pembelajaran berlangsung. Sistem shift atau bergantian menggunakan ruang kelas (ada yang kelas pagi dan kelas siang) juga kurang efektif dilaksanakan karena beban mengajar guru akan bertambah, selain itu ada beberapa peserta didik keberatan untuk datang ke sekolah siang, karena siang merupakan waktu mereka bermain dan istirahat bukan untuk belajar. Oleh karena itu proyeksi kebutuhan ruang kelas ini penting untuk dilakukan, untuk menjadi data perkiraan bagi dinas pendidikan, sekolah dan pemerintah daerah dalam merencanakan ruang kelas dan biaya yang diperlukan di masa yang akan datang.

Dari pembahasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai analisis kebutuhan ruang kelas SD agar ketersediaan ruang kelas dan jumlah peserta didik dan rombongan belajar seimbang. Dengan membuat prediksi yang akurat diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan dalam merencanakan kebutuhan ruang kelas sekolah dasar negeri di Kabupaten Subang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa proyeksi jumlah penduduk kabupaten Subang tahun 2021-2025?
2. Berapa proyeksi jumlah penduduk usia sekolah (7-12 tahun) di kabupaten Subang tahun 2021-2025?
3. Berapa proyeksi jumlah penduduk usia masuk sekolah (6 dan 7 tahun) di kabupaten Subang tahun 2021-2025?

4. Berapa proyeksi jumlah peserta didik keseluruhan berdasarkan angka partisipasi kasar (APK) pada tahun 2021-2025?
5. Berapa proyeksi jumlah peserta didik baru yang terserap oleh SD/MI di kabupaten Subang pada tahun 2021-2025?
6. Berapa proyeksi jumlah ruang kelas yang dibutuhkan di kabupaten Subang pada tahun 2021-2025?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan secara umum dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis ketersediaan ruang kelas SD yang dibutuhkan melalui pendekatan kebutuhan sosial pada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi, mengenai proyeksi:

1. Jumlah penduduk di Kabupaten Subang Tahun 2021-2025.
2. Jumlah penduduk usia sekolah (7-12 tahun) di Kabupaten Subang Tahun 2021-2025.
3. Jumlah penduduk usia masuk sekolah (6 dan 7 tahun) di Kabupaten Subang Tahun 2021-2025.
4. Jumlah peserta didik keseluruhan berdasarkan APK pada tahun 2021-2025 di Kabupaten Subang.
5. Jumlah peserta didik baru yang terserap oleh SD/MI, di kabupaten Subang pada tahun 2021-2025.
6. Jumlah ruang kelas yang dibutuhkan di kabupaten Subang pada tahun 2021-2025.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara garis besar manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, sebagai berikut:

#### **1.4.1 Dari Segi Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan ilmu administrasi pendidikan, khususnya untuk mengembangkan wawasan keilmuan mengenai keterampilan menyusun perencanaan pendidikan dalam membuat proyeksi kebutuhan aspek pendidikan.

#### **1.4.2 Dari Segi Praktis**

##### **1.4.2.1 Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, pengetahuan, pengalaman dan pengembangan pola pikir terkait analisis kebutuhan ruang kelas SD berdasarkan proyeksi penduduk usia sekolah di Kabupaten Subang tahun 2021-2025.

##### **1.4.2.2 Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan dalam merencanakan dan menganalisis kebutuhan ruang kelas baru pada jenjang Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Subang.

#### **1.4.3 Dari Segi Kebijakan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran dalam pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis pendidikan kabupaten Subang.

### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Struktur organisasi skripsi merupakan mekanisme-mekanisme dalam penyusunan skripsi. Struktur organisasi skripsi berisi mengenai keseluruhan isi skripsi dan pembahasannya. Struktur organisasi skripsi dapat dijabarkan dan dijelaskan dengan sistematika penulisan yang runtun. Struktur organisasi skripsi berisi tentang urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab. Struktur organisasi skripsi di mulai dari bab I sampai bab V. Adapun sistematika penulisan skripsi menurut Peraturan Rektor Universitas

Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun 2019, akan dijelaskan sebagai berikut:

**a. Bab I: Pendahuluan**

Bab pendahuluan pada dasarnya menjadi bab perkenalan. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian (umum dan khusus), manfaat/signifikansi penelitian (dari segi teori, kebijakan, praktik dan dari segi isu serta aksi sosial) dan struktur organisasi skripsi.

**b. Bab II: Kajian Pustaka**

Bagian kajian pustaka memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Melalui kajian pustaka ditunjukkan perkembangan termutakhir dalam dunia keilmuan dari teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah dalam bidang ilmu yang diteliti.

**c. Bab III: Metode Penelitian**

Bagian ini merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan. Alur metode penelitian dalam bab ini dimulai dari desain penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, partisipan atau sumber informasi Staf Sarana dan Prasarana SD dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lokasi penelitian di Dinas Pendidikan kabupaten Subang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, teknik pengumpulan data (studi dokumentasi, wawancara dan observasi), teknik analisis data (pengoleksian data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan, verifikasi data).

**d. Bab IV: Temuan dan Pembahasan**

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan



penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

**e. Bab V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi**

Bab ini berisi simpulan dan saran, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian padat.

Implikasi dan rekomendasi yang ditulis setelah simpulan dapat ditujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada pemecahan masalah di lapangan atau tindak lanjut dari hasil penelitian.